



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR: 065/0031/405.26/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak Aparatur Sipil Negara dalam memperoleh pelayanan kepegawaian secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/20/M/PAN/11/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 141 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo.
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (SPP) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:

NO.	BIDANG	SUBAG/SUBID	JUDUL SOP	NOMOR
1	SEKRETARIAT	UMUM KEPEGAWAIAN DAN	SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK	1.1.1.1
2			SOP LAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KEPEGAWAIAN	1.1.1.2
3			SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR	1.1.1.3
4		KEUANGAN	SOP PENGAJUAN SPP DAN SPM	1.1.2.1
5			SOP LAPORAN KEUANGAN	1.1.2.2
6		PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)	1.1.3.1
7			SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)	1.1.3.2
8	PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN	SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN ASN	SOP PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.2.1.1
9			SOP PENGURUSAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.2.1.2
10			SOP PENGURUSAN IZIN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.2.1.3
11			SOP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.2.1.4
12		SUB BIDANG PENILAIAN	SOP MENERBITKAN SKP	1.2.2.1

13		KINERJA ASN	SOP PELAPORAN PENGISIAN LHKPN	1.2.2.2	
14		SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENGIHARGAAN ASN	SOP PELAYANAN PENGURUSAN KARTU ISTRI (KARIS) / KARTU SUAMI (KARSU)	1.2.3.1	
15	SOP PENGURUSAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL (KARPEG)		1.2.3.2		
16	SOP PENGURUSAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA		1.2.3.3		
17	SOP SPENGURUSAN KARTU TASPEN CPNS/PNS		1.2.3.4		
18	SOP PENGURUSAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL		1.2.3.5		
19	BIDANG PERENCANAAN, PENGADAAN, PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ASN		SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN	SOP PERENCANAAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA	1.3.1.1
20		SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ASN	SOP SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN PELAYANAN DATA KEPEGAWAIAN	1.3.2.2	
21		SUB BIDANG FASILITASI PROFESI ASN	SOP SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN PELAYANAN PERMINTAAN DATA	1.3.3....	
22	BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	SUB BIDANG PERPINDAHAN DAN PENSUN	SOP MUTASI ANTAR DAERAH/INSTASI (MASUK)	1.4.1.1	
23			SOP MUTASI ANTAR DAERAH/INSTASI (KELUAR)	1.4.1.2	
24			SOP PELAYANAN MUTASI INTERNAL	1.4.1.3	
25			SOP PELAYANAN PENSUN BERBASIS LESSPAPER	1.4.1.4	
26		SUB BIDANG KEPANGKATAN	SOP PELAYANAN PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA	1.4.2.1	
27			SOP PELAYANAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT BERBASIS LESSPAPER	1.4.2.2	
28		SUB BIDANG JABATAN DAN PROMOSI		SOP SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1.4.3.1
29				SOP PROSES PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	1.4.3.2
30				SOP PROSES PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	1.4.3.3
31				SOP PROSES KENAIKAN DAN ALIH JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	1.4.3.4
32	SOP PROSES PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			1.4.3.5	
33	SOP PROSES PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			1.4.3.6	
34	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR DAN MANAJERIAL	SOP PROSES PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	1.5.1.1	
35			SOP PROSES PENYELENGGARAAN	1.5.1.2	

			DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	
36		SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	SOP PROSES PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II	1.5.2.1
37			SOP PROSES PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR	1.5.2.2
38			SOP PROSES PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS	1.5.2.3
39			SOP PROSES PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR	1.5.2.4
40			SOP PROSES PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN I, II DAN III	1.5.2.5
41			SOP PROSES PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS	1.5.2.6
42			PROSES PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN I, II DAN III	1.5.2.7
43			PROSES PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN I, II DAN III	1.5.2.8
44			SOP PROSES PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN I, II DAN III	1.5.2.9
45			SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN	SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG UJIAN DINAS
46		SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG UJI KOMPETENSI		1.5.3.2
47		SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA		1.5.3.3
48		SOP PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR DAN IJIN TUGAS BELAJAR PNS		1.5.3.4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo
pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PONOROGO



N. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM

Ketua Muda
NIP. 19621201 199003 1 010